

Dini Noor Aini

by Turnitin Official

Submission date: 13-Feb-2023 03:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 2003195503

File name: 4._265-909-1-PB.docx (57.83K)

Word count: 3175

Character count: 25655

**EFEKTIFITAS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (SIAK) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONDOWOSO**

DINI NOOR AINI*
ALFIAN FIRMANSYAH
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
*Email: dininooraini225@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the effectiveness of the Population Administration Information System (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/SIAK) covering human resources, population data, facilities and infrastructure at the Population and Civil Registration Office of Bondowoso Regency. Research with a qualitative approach uses informants from the Population and Civil Registration Office of Bondowoso Regency and the use of SIAK services. Data collection techniques are through interviews, observations, and documentation which are then carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The effectiveness of the population administration information system at the Population and Civil Registration Office of Bondowoso Regency has been implemented quite effectively, even though all SIAK management operators are contract workers.

Keywords: Effectiveness, SIAK, Population, Civil Registration

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang sangat besar dengan persebaran tidak merata disertai rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan yaitu Pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 2006. SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah Kabupaten/Kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya.

Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan SIMDUK ini pemerintah merasa perlu menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data

kependudukan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan adanya sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dapat merealisasikan *database* penduduk. Dengan demikian pelayanan yang dihasilkan tidak hanya sebatas dapat merealisasikan pengumpulan *database* penduduk, tetapi sekaligus memberi Nomor Induk bagi setiap penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda. Untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data penduduk yang berbasis teknologi informasi, Pemerintah Pusat dalam hal ini telah menyiapkan suatu sistem yang diberi nama “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan” atau disingkat SIAK.

Dari hasil observasi lapangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendul) Kabupaten Bondowoso mulai menerapkan sistem ini sejak tahun

2010 dan sudah menghasilkan *database* kependudukan untuk Kabupaten Bondowoso. *Database* kependudukan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk Kabupaten Bondowoso dan dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Selama ini Pemerintah Kabupaten Bondowoso hanya menggunakan data yang dihasilkan dari Kantor Statistik maupun pendataan yang dilakukan oleh instansi terkait lainnya.

Dengan diterapkannya SIAK, diharapkan memudahkan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya efektivitas organisasi. Namun, berdasarkan wawancara singkat dengan salah seorang warga yang sedang mengurus akta kelahiran, mengaku bahwa Ia harus menunggu beberapa hari untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Padahal seharusnya dengan diterapkannya SIAK, masyarakat tidak perlu menunggu lama sebab sistem ini sudah berbasis *online*. Oleh sebab itu

efektivitas penerapan SIAK ini sendiri belum terlaksana dengan baik, dengan dijumpainya beberapa masalah di lapangan.

Penelitian terdahulu milik Nugroho & Warsono (2012) yang meneliti mengenai SIAK, dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menggunakan teori evaluasi elemen kebijakan publik yang terdiri dari *support capacity* dan *value*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Astuty (2014) dengan judul Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros. Penelitian ini menilai penerapan SIAK dari faktor-faktor yang mempengaruhi SIAK yaitu sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan sosialisasi.

Penelitian ini berjudul "Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Bondowoso”. Untuk mengukur efektivitas suatu program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, perlu dilakukan penilaian terhadap manfaat atau daya guna program tersebut.

Lubis dan Huseini (1987) mengemukakan tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi, yakni pendekatan sumber (*input*), pendekatan proses, dan pendekatan sasaran (*output*). Penelitian ini berfokus pada pendekatan proses dengan melihat

efektivitas pelaksanaan SIAK meliputi sumber daya manusia, data kependudukan, sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas SIAK yang meliputi sumber daya manusia, data kependudukan, sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Definisi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SIAK merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat

Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;

- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

2.2 Konsep Efektivitas

Efektivitas menurut The Liang Gie (1998) dalam bukunya *Ensiklopedia Administrasi* adalah sebagai berikut dikatakan efektif, kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Harbani Pasolong (2008), juga mengemukakan efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Sedangkan pendapat lain mengenai pengertian efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh

Drucker dalam H.A.S. Moenir (2010) mengenai efektivitas adalah melakukan atau mengerjakan tepat pada sasaran (*doing the right thing*).

Untuk mengetahui efektivitas suatu program, perlu dilakukan penilaian terhadap manfaat atau daya guna program tersebut. Lubis dan Huseini (1987) mengemukakan tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi

1. Pendekatan Sumber (Resource Approach)

Pendekatan sumber mencoba mengukur efektivitas dari sisi input dan mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performansi yang baik. Dengan kata lain, efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya tinggi. Untuk mengukur efektivitas organisasi pendekatan sumber mempergunakan dimensi (a) kemampuan organisasi untuk memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber

yang bersifat langka dan nilainya tinggi; (b) kemampuan para pengambil keputusan dalam organisasi untuk menginterpretasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat; (c) kemampuan untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang berhasil diperoleh; (d) kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasional harian; (e) kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.

2. Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi (kesehatan) dari organisasi internal. Pada organisasi yang efektif proses internal berjalan dengan lancar, karyawan bekerja dengan kegembiraan serta kepuasan yang tinggi, kegiatan masing-masing bagian terkoordinasi secara baik dengan produktivitas yang tinggi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan organisasi, dan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap

sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi.

Pendekatan proses umumnya digunakan oleh penganut pendekatan neo-klasik (*human relations*) dalam teori organisasi yang terutama meneliti hubungan antara efektivitas dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi.

Berbagai komponen yang menunjukkan efektivitas organisasi ditunjukkan pada daftar berikut ini. Setiap komponen ini diteliti dengan mengadakan wawancara terhadap anggota organisasi.

- a. Perhatian atasan terhadap karyawan.
- b. Semangat, kerjasama dan loyalitas kelompok kerja.
- c. Saling percaya dan komunikasi antara karyawan dengan pimpinan.
- d. Desentralisasi dalam pengambilan keputusan.
- e. Adanya komunikasi vertikal dan horizontal yang lancar dalam organisasi.
- f. Adanya usaha dari setiap individu maupun

keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

- g. Adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan untuk mengusahakan terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif serta performansi dan pengembangan karyawan.
- h. Organisasi dan bagian-bagian bekerja sama secara baik, dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan acuan kepentingan organisasi.

3. Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*)

Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas memusatkan perhatian terhadap aspek *output*, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan *output* yang direncanakan. Pendekatan sasaran dalam mengukur

efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang paling penting dalam pengukuran efektivitas adalah sasaran yang sebenarnya karena akan memberikan hasil yang lebih realistis dari pada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan seperti; (a) adanya berbagai output; (b) adanya subyektivitas dalam penilaian; (c) pengaruh konstektual lingkungan.

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian efektivitas maka yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas ini berada pada pencapaian tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun dalam penelitian tentang Efektivitas Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, indikator yang digunakan ialah

pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi oleh Lubis & Huseini (1987), yang berfokus pada pendekatan proses (*process approach*) yang meliputi:

- a. Sumber daya manusia yaitu tenaga operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
- b. Data kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta
- c. Sarana dan prasarana yang terdiri dari perangkat komputer (*hardware and software*) serta jaringan

internet yang menunjang efektivitas pelaksanaan SIAK.

Informan terdiri dari empat orang dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso dan empat orang masyarakat yang menerima pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan penyajian data, reduksi data, penyajian data setelah data direduksi dan tahap akhir penarikan kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Daerah Penelitian

Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso adalah “Terwujudnya kelembagaan dan aparatur yang handal dan memuaskan dalam pelayanan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil”.

Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso adalah:

1. Mewujudkan aparatur yang inovatif, kreatif, produktif dan berwibawa.
2. Mewujudkan sistem dan tata kerja kelembagaan yang efektif dan efisien dalam pelayanan bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Dinas Catatan Sipil.
3. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat yang

konstruktif dalam kegiatan Administrasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Dinas Catatan Sipil.

Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso adalah:

1. Terciptanya kelembagaan yang handal dan efisien dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Dinas Catatan Sipil.
 2. Terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif, inovatif dan produktif.
 3. Tersedianya sistem pengelolaan Administrasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Dinas Catatan Sipil.
 4. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin dalam pelayanan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso adalah:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, keluarga

berencana dan dinas catatan sipil secara optimal.

2. Mewujudkan kesadaran keluarga dan masyarakat untuk melaksanakan program Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso adalah:

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi dan koordinasi oleh Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso adalah “Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi perencanaan program, pelaksanaan dan pengendalian di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Dinas Catatan Sipil”.

Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso adalah:

1. Perumusan kebijakan tentang perencanaan pembangunan dan pengolahan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.
6. Merumuskan perencanaan kebijaksanaan, pembinaan dan

perijinan di bidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

7. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan catatan sipil.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

4.2 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso

Efektivitas pengelolaan SIAK dicapai melalui beberapa pendekatan yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis meliputi: pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran. Pada penelitian ini, penulis melihat efektivitas pengelolaan SIAK melalui pendekatan proses. Adapun indikator yang kemudian digunakan dalam mengukur efektivitas melalui pendekatan proses terhadap pengelolaan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bondowoso adalah sebagai berikut:

4.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai penunjang dalam penerapan SIAK merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Dalam mendukung keberhasilan organisasi mencapai tujuan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso didukung oleh aspek sumber daya manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 25 orang, tenaga kontrak berjumlah 34 orang, dan tenaga sukarela sebanyak 2 orang. Dari penjelasan Bapak kepala Dinas Dukcapil Bondowoso dan Ibu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk penulis menyikapi, bahwa jumlah PNS di Dukcapil Bondowoso lebih sedikit dibanding dengan tenaga kontrak. Operator SIAK juga berasal dari tenaga kontrak. Dapat dilihat pula operator pengelola SIAK hanya berjumlah 14 orang sedangkan jumlah Kecamatan di Kabupaten Bondowoso ada 23 Kecamatan. Namun pengelolaan SIAK sudah mampu berjalan dengan tepat sasaran dan lancar dengan tenaga operator tersebut.

Pengelolaan SIAK lancar berdasarkan jumlah SDM maka hal ini dilihat pula dari segi latar belakang pendidikan sumber daya yang mengelola SIAK tersebut. Jumlah operator sudah sangat mendukung untuk mengelola SIAK karena didukung dengan latar belakang pendidikan yang sebagian besar bergelar sarjana yaitu berjumlah 8 orang, di samping itu tenaga operator ini pula diberikan pelatihan khusus berupa BIMTEK (Bimbingan Teknis) sebelum mengelola SIAK dan syarat utama serta mendasar bagi operator tentunya harus mampu mengoperasikan komputer.

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Dukcapil Bondowoso:

“Total keseluruhan ada 61 orang, masing-masing terdiri dari 25 orang PNS, 34 orang tenaga kontrak dan 2 orang tenaga sukarela. Tiap bidang terdapat PNS dan tenaga kontraknya, untuk pengelolaan SIAK itu sendiri ada 14 tenaga operator yang mengelola dan menjalankan komputer, mereka semua tenaga kontrak khusus untuk operator saja. Untuk seksi pengembangan aplikasi SIAK pegawainya adalah PNS”

(hasil wawancara pada tanggal 7 Juli 2017)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk:

“Untuk pengelolaan SIAK itu ditangani oleh Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK, dan tenaga operatornya ada 14 orang. Kenapa 14? Karena masing-masing operator itu menangani 23 Kecamatan. Ada yang menangani *double* per satu kecamatan.” (hasil wawancara pada tanggal 9 Juli 2017)

Dari hasil wawancara dan data-data yang diperoleh, penulis beranggapan bahwa dari segi sumber daya manusia pengelola SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bondowoso sudah memadai. Operator pengelola SIAK memang hanya berjumlah 14 orang tetapi mereka mampu untuk menangani 23 Kecamatan dengan baik, hal ini terbukti karena pengelolaan SIAK tetap berjalan lancar walaupun operatornya hanya berjumlah 14. Latar belakang pendidikan operatorpun tidak mempengaruhi pengelolaan SIAK, sebab mereka diberikan pelatihan khusus berupa BIMTEK (Bimbingan Teknis), dan

selalu dipandu oleh Bapak Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK yang merupakan *Administrator Database* di Dukcapil Bondowoso.

4.2.2 Data Kependudukan

Semenjak SIAK diterapkan di Bondowoso melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penerbitan e-KTP dan KK sudah tidak lagi memakan waktu yang lama. Untuk penerbitan Kartu Keluarga, datanya diambil dari SIAK, masyarakat hanya datang membawa kelengkapan berkas yang dibutuhkan.

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK:

“Untuk e-KTP data terkonsolidasi ke pusat, sehingga nanti di pusat akan ketahuan jika ada penduduk yang memiliki NIK ganda, inilah biasanya yang memakan waktu yang cukup lama. Dan yang menjadi persoalan biasanya bagi penduduk yang pindah tempat tinggal. Tetapi jika sebelumnya belum pernah mengurus e-KTP maka itu tidak memakan waktu yang lama.” (hasil wawancara pada tanggal 4 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh, penulis

menyikapi bahwa SIAK memuat seluruh data kependudukan yang digunakan untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sistem *online* kependudukan ini sangat membantu pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bondowoso dalam perekaman data kependudukan. Dari segi penerbitan e-KTP dan KK tidak memakan waktu yang lama, NIK gandum sudah bisa diminimalisir oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan masyarakat Ibu D yang sementara mengurus KK:

“Saya sementara mengurus KK. Hanya 2 hari KK saya sudah selesai, apalagi kalau tidak banyak orang. Tetapi kita harus tetap mengantri ketika akan mengurus.” (hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2017)

Hal sama juga diungkapkan oleh salah seorang masyarakat Ibu A:

“Syaratnya tidak banyak. Salah satunya KTP, jika KTP tidak ada maka kita tidak akan diberikan KK jadi harus berfoto untuk KTP dulu. Waktu pencetakannya pun tidak lama. Saya mengurus kemarin hari ini sudah jadi.” (hasil

wawancara pada tanggal 5 Juli 2017)

Selanjutnya operator SIAK mengungkapkan hal yang sama:

“Yang penting datanya lengkap dan pernah diinput di SIAK, pengurusannya tidak lama. Itu kalau tidak lengkap harus memang diinput lagi, apalagi kalau tidak punya e-KTP harus urus e-KTP nya dulu baru bisa dilayani KK nya” (hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh, penulis menyikapi bahwa untuk penerbitan e-KTP, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil (Akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian) seluruh datanya diakses dari SIAK. Data kependudukan yang sudah terekam dan terinput masuk SIAK digunakan oleh Dukcapil Bondowoso untuk penerbitan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. SIAK yang sudah berbasis *online* memudahkan pegawai dalam penerbitan e-KTP, KK dan akta catatan sipil, selain itu juga tidak memakan waktu yang lama.

4.2.3 Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung berjalannya SIAK tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar lebih efektif dalam menghasilkan produk-produk SIAK. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bondowoso memiliki berbagai sarana dan prasana untuk menunjang keberlangsungan proses pelayanan yang diberikan, terkhususnya bagi pelaksanaan SIAK. Kondisi sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yaitu memiliki sebuah gedung kantor yang terletak di Jl. Kartika No.16 Nomor Telepon (0423) 21021.

Untuk fasilitas penunjang operator pelaksana SIAK, berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK:

“Masing-masing operator dilengkapi dengan computer, dan beberapa diantaranya

lengkap beserta printernya. Untuk pencetakan e-KTP ada mesin khususnya dan sudah dimiliki di Dinas” (hasil wawancara pada tanggal 4 Juli 2017)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Kepala Dukcapil Bondowoso:

“Operator dilengkapi dengan computer, untuk pencetakan e-KTP dicetak di kantor, karena Dinas sudah punya mesin khusus mencetak e-KTP. Sama halnya dengan scanner untuk sidik jari dalam pembuatan e-KTP, semuanya sudah lengkap. Untuk cetak akta juga sudah lengkap” (hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2017)

Penulis menyikapi sarana dan prasarana untuk pengelolaan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memadai. Pengelolaan SIAK didukung dengan tersedianya computer untuk masing-masing operator, mesin printer, mesin pencetak e-KTP, server jaringan yang dimiliki sendiri oleh Dinas.

Tabel 1. Sarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bondowoso

No	Sarana	Jumlah
1	Server	2 unit
2	Komputer	17 unit
3	Printer	10 unit
4	Scanner	7 unit
5	Meja Tulis	24 unit
6	Kursi besi/metal	24 unit
7	Kursi Putar	15 unit
8	Lemari	8 unit
9	Peti Uang	1 unit
10	Fiiling Kabinet	1 unit
11	Mesin Tik	1 unit
12	Faximile	1 unit
13	Pesawat Telepon	1 unit
14	Camera (Canon)	1 unit
15	Web Camera	1 unit
16	Kendaraan Roda 4 (Toyota Innova)	11 unit
17	Kendaraan Roda 2 (Honda Revo & Kawasaki Trail)	5 unit

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bondowoso (2017)

Dari ketiga indikator mengukur efektivitas SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bondowoso, ditinjau dari segi proses dengan indikator sumber daya manusia, data kependudukan, sarana dan prasarana, penulis beranggapan dari semua data dan wawancara yang diperoleh di atas, bahwa SIAK sejauh ini sudah berjalan dengan efektif di Bondowoso. Pengelolaan SIAK oleh operator dalam menginput data kependudukan dengan didukung sarana dan

prasarana yang memadai, sudah berjalan dengan efektif. Kepemilikan e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan penerbitannya pun tidak memakan waktu yang lama. Dengan SIAK, database kependudukan lebih mudah diakses dan akan semakin mempermudah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan produk-produk SIAK itu sendiri.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Efektivitas SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sudah terlaksana cukup efektif, walaupun tenaga operator pengelola SIAK semuanya adalah tenaga kontrak. Sumber daya manusia yang mengelola data kependudukan dan menghasilkan produk SIAK didukung oleh sarana yang cukup memadai, sudah berjalan cukup efektif.

5.2 Saran

Saran yang diharapkan menjadi masukan untuk lebih meningkatkan pengelolaan SIAK pada Dukcapil Kabupaten Bondowoso lebih efektif, antara lain:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso diharapkan

melaksanakan sosialisasi mengenai SIAK yang berbasis *online* kepada masyarakat.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso disarankan untuk memasang papan informasi mengenai alur penerbitan KTP, KK, dan Akta-akta.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso diharapkan lebih meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan SIAK. Setiap sumber daya manusia diharapkan mampu menciptakan sinergi dalam melaksanakan tugas hariannya sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan pelaksanaan tugas yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Astuty, F. A. (2014). Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros.

Harbani, Pasolong. (2008). Kepemimpinan Birokrasi, Bandung: CV. Alfabeta.

Liang Gie, The. (1998). Ensiklopedi Administrasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Lubis, H., & Huseini, M. (1987). Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro. *Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI: Jakarta*.
- Moenir, H.A.S. (2010). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- Nugroho, P. A., & Warsono, H. (2012). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review, 1(2)*, 211-220.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dini Noor Aini

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.stiapembangunanjember.ac.id

Internet Source

8%

2

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

6%

3

journal.unj.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On